

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Perekonomian suatu negara tidak terlepas dari peran konsumsi rumah tangga sebagai komponen utama dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB). Di Indonesia, konsumsi rumah tangga secara konsisten memberikan kontribusi terbesar terhadap total PDB, sehingga perubahan pada pola konsumsi dapat mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Tinggi rendahnya aktivitas konsumsi sangat dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang dalam konteks ekonomi dikenal sebagai daya beli masyarakat.

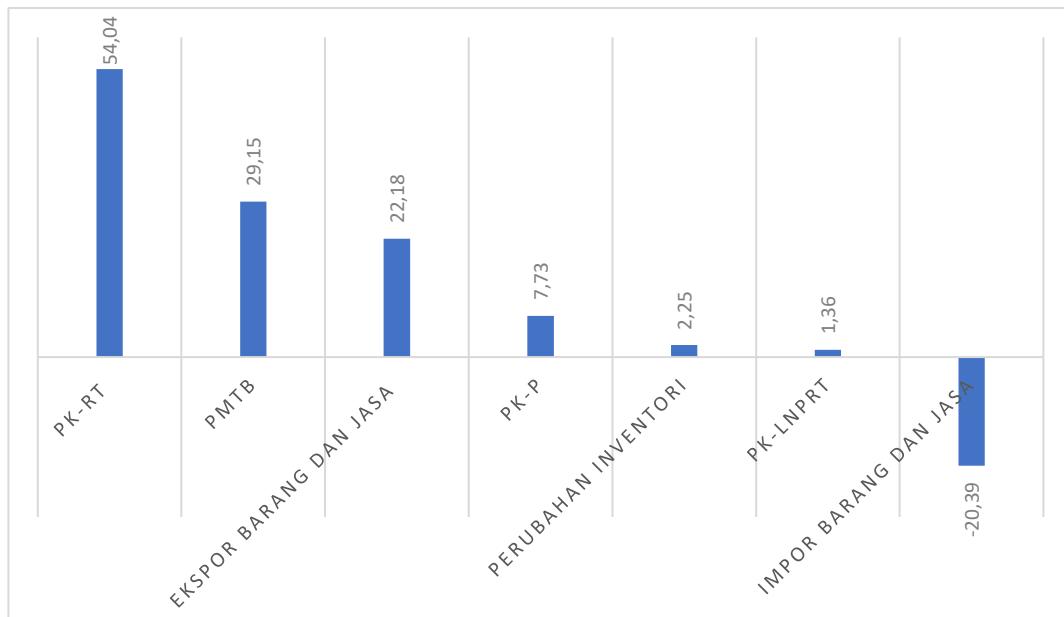
Daya beli tidak hanya menggambarkan kemampuan masyarakat dalam mengonsumsi barang dan jasa, tetapi juga menjadi indikator penting untuk menilai tingkat kesejahteraan. Ketika daya beli meningkat, konsumsi rumah tangga cenderung naik sehingga berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, daya beli yang menurun dapat mengindikasikan adanya tekanan ekonomi yang dialami masyarakat, seperti kenaikan harga atau pendapatan yang tidak memadai.

Daya beli masyarakat mengacu pada kemampuan individu untuk mengeluarkan uang dalam membeli barang dan jasa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan mereka (Susanti, 2021). Kondisi ekonomi masyarakat dapat diukur melalui tingkat kemampuan daya beli. Semakin tinggi daya beli masyarakat, semakin baik pula keadaan ekonomi masyarakat (Anonim, 2020).

Masyarakat dengan pendapatan minim atau daya beli rendah akan membeli produk dengan harga lebih rendah dan jumlah lebih sedikit (Silvia *et al.*, 2021). Kesejahteraan masyarakat diukur melalui daya beli (Hidayati and Maskuri, 2020). Peningkatan permintaan terhadap produk dipicu oleh pendapatan masyarakat miskin, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurunnya daya beli berdampak pada menurunnya konsumsi rumah tangga. Penurunan pengeluaran per kapita secara langsung mempengaruhi penurunan konsumsi rumah tangga karena konsumsi tersebut berasal dari total pengeluaran per kapita dalam sebuah rumah tangga (Nurkhanifah *et al.*, 2023).

**Gambar 1. 1 Struktur Ekonomi Indonesia Berdasarkan Pengeluaran Tahun 2024**



Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah

Berdasarkan gambar di atas, cukup menjelaskan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga (PK-RT) memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB, yaitu sebesar 54,04 persen. Hal ini memperlihatkan betapa perekonomian Indonesia

sangat bergantung pada belanja masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) juga memiliki peran penting dengan kontribusi sebesar 29,15 persen. Hal tersebut mencerminkan investasi dalam aset tetap seperti bangunan, mesin, dan infrastruktur.

Lebih lanjut, ekspor barang dan jasa menyumbang 22,18 persen yang menunjukkan bahwa perdagangan internasional juga mendukung perekonomian. Di sisi lain, pengeluaran konsumsi pemerintah (PK-P) hanya mencapai 7,73 persen, menunjukkan bahwa belanja pemerintah berkontribusi lebih kecil dibandingkan konsumsi rumah tangga dan investasi.

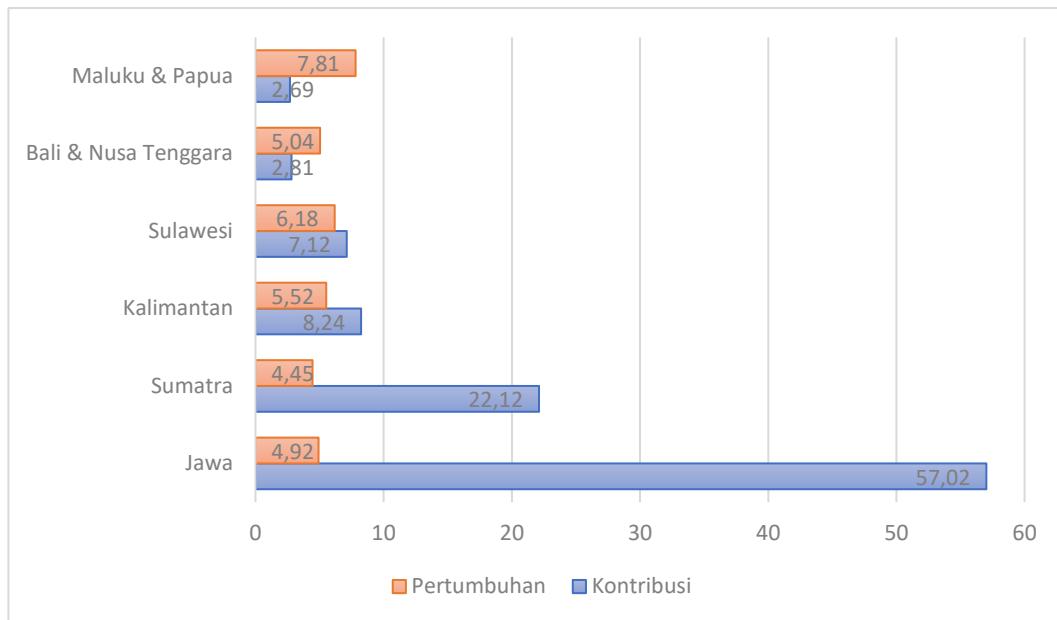
Perubahan inventori sebesar 2,25 persen menunjukkan adanya penyesuaian dalam persediaan barang oleh perusahaan. Pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (PK-LNPRT) tercatat berkontribusi sebesar 1,36 persen menunjukkan sektor ini berkontribusi kecil terhadap perekonomian. Sementara itu, impor barang dan jasa bernilai negatif sebesar -20,39 menunjukkan bahwa jumlah barang dan jasa yang diimpor lebih besar sehingga mengurangi nilai PDB.

Pulau Jawa sangat penting bagi perekonomian Indoenesia, terutama jika daya beli masyarakat mlemah. Ketika daya beli masyarakat Pulau Jawa ambruk, pertumbuhan ekonomi nasional turut melambat dan sektor industri domestik seperti retail, manufaktur, dan pariwisata merasakan efek negatif yang signifikan (Yogatama, 2024).

Total output manufaktur nasional terpusat di Pulau Jawa sebesar 56,3%. Di jabodetabek, industri manufaktur berskala besar meliputi sektor makanan, otomotif, dan elektronik. Sedangkan, di Jawa Tengah dan Jawa Timur, industri manufaktur

yang dominan terdiri dari maknan dan minuman, serta tekstil dan garmen (Danareksa, 2023).

**Gambar 1.2 Pertumbuhan & Kontribusi Terhadap PDB 2024**



Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah

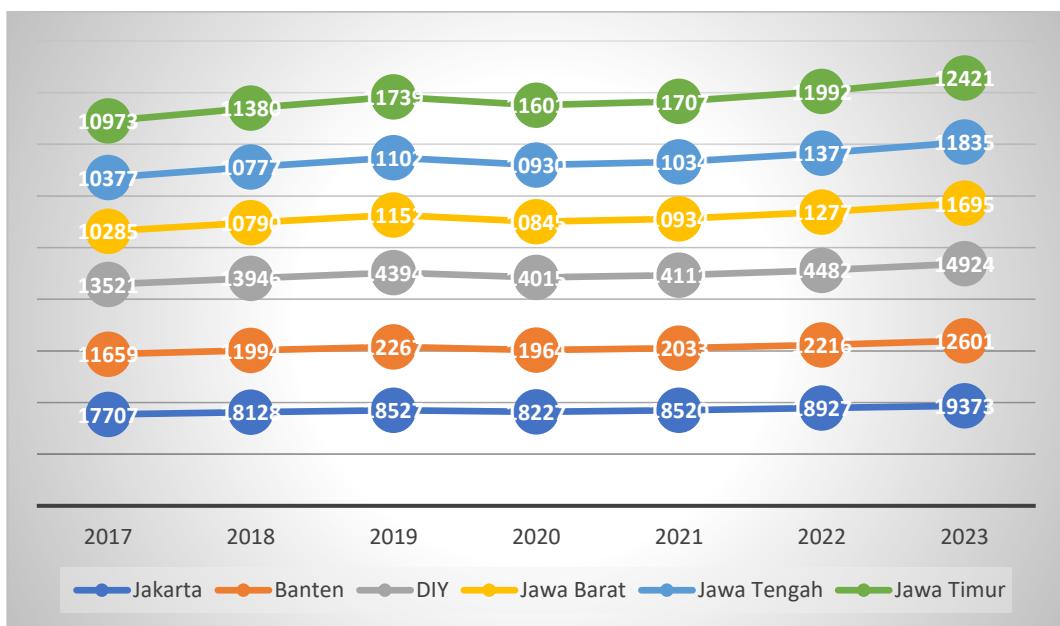
Menurut data dari Badan Pusat Statistik, kontribusi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia masih bersifat Jawa sentris, dengan Pulau Jawa masih mendominasi sebesar 57,02 persen pada tahun 2024. Kemudian disusul oleh Sumatera yang menyumbang sebesar 22,12 persen. Lalu, Kalimantan dengan 8,24 persen. Disusul Sulawesi dengan 7,12 persen, Bali dan Nusa Tenggara 2,81 persen, dan yang terakhir Papua dan Maluku yang menyumbang sebesar 2,69 (Anonim, 2025).

Namun, jika dibandingkan dengan kontribusinya yang besar, pertumbuhan ekonomi di Jawa hanya mencapai 4,92 persen yang tergolong rendah dan tidak setinggi beberapa daerah lain seperti Maluku dan Papua yang tumbuh sebesar 7,81 persen atau Sulawesi yang tumbuh 6,18 persen.

Penelitian yang dilakukan oleh Murti dkk (2023) menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga yang memiliki kontribusi besar terhadap PDB, dengan sekitar 64% dari total pengeluaran konsumsi masyarakat berasal dari Pulau Jawa. Jawa berperan sebagai perantara utama dalam interaksi ekonomi antara luar Jawa dan pasar internasional (Rinardi *et al.*, 2023).

Oleh karena itu, pendekatan yang tepat untuk meningkatkan daya beli masyarakat di Pulau Jawa dapat dikembangkan dengan memahami aspek-aspek yang memengaruhi daya beli tersebut. Hal ini diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa.

**Gambar 1.3 Daya Beli Masyarakat Pulau Jawa Periode 2017-2023**



Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah

Grafik di atas menggambarkan tren daya beli di enam provinsi di Pulau Jawa antara tahun 2017 hingga 2023. Disparitas peningkatan daya beli antar provinsi merupakan salah satu aspek yang paling terlihat. Meskipun Jawa Timur mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2023, wilayah lain seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah hanya mengalami pertumbuhan yang sangat moderat.

Ketimpangan ini berpotensi menyebabkan kesenjangan ekonomi antarprovinsi, di mana daerah dengan daya beli tinggi akan berkembang lebih pesat. Sedangkan daerah dengan pertumbuhan yang lebih lambat dapat tertinggal (Rosyadi, 2019).

Selain itu, beberapa wilayah seperti Banten dan DIY mengalami fluktuasi daya beli. Hal tersebut menunjukkan ketidakstabilan ekonomi yang bisa disebabkan oleh faktor ekonomi seperti inflasi pendapatan perkapita, tingkat pengangguran, UMP, harga, investasi, belanja pemerintah dan kredit konsumsi.

Ketidakstabilan ini bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Laju pertumbuhan yang relatif lambat di daerah seperti Jawa Barat juga perlu diperhatikan karena dapat mengindikasikan lemahnya daya dorong ekonomi atau kurangnya investasi yang signifikan di wilayah tersebut.

Sebagai ibu kota dan pusat ekonomi nasional seharusnya daya beli di Jakarta jauh lebih tinggi daripada provinsi lainnya. Namun nyatanya, pertumbuhan di jakarta terlihat stagnan dibandingkan Jawa Timur. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa daya beli masyarakat di provinsi-provinsi di Pulau Jawa mengalami pertumbuhan yang rendah dan kurang signifikan.

Keynes berpendapat mengenai teori konsumsi bahwa pendapatan memengaruhi konsumsi (Iskar *et al.*, 2024). Ketika daya beli meningkat, elastisitas permintaan akan meningkat, artinya orang akan mau membeli lebih banyak barang dan jasa. Daya beli masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk inflasi, pendapatan per kapita, UMP, investasi, belanja pemerintah dan kredit konsumsi.

Inflasi yang tinggi bisa merugikan perekonomian dengan meningkatkan biaya produksi, mengurangi tingkat investasi dan menurunkan daya beli masyarakat (Hidayati and Maskuri, 2020). Selain inflasi, pendapatan perkapita juga dianggap

salah satu faktor yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat akan meningkat ketika pendapatan per kapita meningkat. Meningkatnya pendapatan perkapita menyebabkan peningkatan pula terhadap daya beli (Soleh *et al.*, 2023).

Terdapat korelasi positif antara pendapatan per kapita dan daya beli masyarakat. Pendapatan per kapita akan meningkat seiring dengan peningkatan daya beli masyarakat. Di sisi lain, pendapatan per kapita akan menurun seiring dengan menurunnya daya beli masyarakat. (Yusuf and Nurmalah, 2016).

Menurut penelitian Zahara (2022), upah minimum kabupaten/kota berpengaruh signifikan terhadap daya beli masyarakat. Pendapatan masyarakat meningkat seiring dengan upah minimum suatu daerah. Kemampuan masyarakat untuk mengonsumsi produk dan jasa meningkat seiring dengan pertumbuhan pendapatan ini.

Daya beli dipengaruhi secara positif oleh investasi. Jika investasi yang diterima meningkat, pendapatan pun akan ikut meningkat. Dengan meningkatnya pendapatan yang diterima maka hasilnya akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat (Yusuf and Nurmalah, 2016).

Belanja pemerintah berpengaruh terhadap daya beli masyarakat secara signifikan. Belanja pemerintah memiliki hubungan erat dengan kebijakan pemerintah dalam mengatur ekonomi negara. Semakin tinggi belanja pemerintah yang dialokasikan untuk masyarakat, maka semakin besar dampaknya terhadap peningkatan ekonomi masyarakat (Yusuf and Nurmalah, 2016). Ketika akses terhadap kredit lebih mudah maka dapat meningkatkan daya beli masyarakat karena

mereka dapat meminjam untuk memenuhi kebutuhan konsumsi (Halim, Hubeis, *et al.*, 2022).

Berdasarkan penjelasan di atas, mempelajari daya beli masyarakat sangat penting untuk memahami dinamika sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian tentang “Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Daya Beli Masyarakat Pulau Jawa” menjadi penting untuk dilakukan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Latar belakang yang diberikan sebelumnya berfungsi sebagai dasar untuk perumusan masalah berikut::

1. Apakah inflasi berpengaruh terhadap daya beli masyarakat di Pulau Jawa?
2. Apakah pendapatan per kapita berpengaruh terhadap daya beli masyarakat di Pulau Jawa?
3. Apakah upah minimum provinsi berpengaruh terhadap daya beli masyarakat di Pulau Jawa?
4. Apakah investasi berpengaruh terhadap daya beli masyarakat di Pulau Jawa?
5. Apakah belanja pemerintah berpengaruh terhadap daya beli masyarakat di Pulau Jawa?
6. Apakah kredit konsumsi berpengaruh terhadap daya beli masyarakat di Pulau Jawa?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan utama dari penelitian ini:

1. Untuk menganalisis apakah inflasi berpengaruh terhadap daya beli masyarakat di Pulau Jawa.

2. Untuk menganalisis apakah pendapatan per kapita berpengaruh terhadap daya beli masyarakat di Pulau Jawa.
3. Untuk menganalisis apakah upah minimum provinsi berpengaruh terhadap daya beli masyarakat di Pulau Jawa.
4. Untuk menganalisis apakah investasi berpengaruh terhadap daya beli masyarakat di Pulau Jawa.
5. Untuk menganalisis apakah belanja pemerintah berpengaruh terhadap daya beli masyarakat di Pulau Jawa.
6. Untuk menganalisis apakah kredit konsumsi berpengaruh terhadap daya beli masyarakat di Pulau Jawa.

#### **1.4 Ruang Lingkup Penelitian**

Batasan ruang lingkup penelitian diperlukan untuk menjaga fokus penelitian pada masalah, yaitu:

1. Penelitian mencakup data panel tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 6 Provinsi di Pulau Jawa.
2. Penelitian menggunakan variabel antara lain inflasi, pendapatan per kapita, UMP, investasi, belanja pemerintah dan kredit konsumsi.
3. Sebagaimana disebutkan dalam tujuan, penting untuk memahami keterbatasan penelitian ini berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya. Penelitian ini berfokus pada bagaimana daya beli masyarakat dipengaruhi oleh inflasi, pendapatan perkapita, UMP, investasi, belanja pemerintah, dan kredit konsumsi.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan beberapa manfaat yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Untuk ilmu pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber penelitian ilmiah lebih lanjut di bidang ekonomi, khususnya mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi daya beli masyarakat di Pulau Jawa.

2. Bagi peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat sebagai sarana untuk memperluas pengetahuan serta mendapatkan pemahaman tentang hubungan antara variabel yang berhubungan maupun tidak berhubungan.

3. Bagi instansi pemerintah

Penelitian diharapkan dapat membantu pemerintah Pulau Jawa dalam meningkatkan daya beli masyarakat dengan memberikan perspektif yang lebih baik tentang masyarakat di Pulau Jawa yang sejahtera.